



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**DOKUMEN RENCANA KERJA  
TAHUN 2023**





**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 44 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen rancangan awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memerlukan adanya dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023;

*Handwritten signature or mark.*



Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



- Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 24);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan jangka menengah periode 5 (lima) tahun yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



9. Rencana Strategis Perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- (3) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (4) Renja Perangkat Daerah menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

## **BAB III ISI DAN URAIAN**

### **Pasal 3**

- (1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

|         |   |
|---------|---|
| BAB I   | : PENDAHULUAN;                                      |
| BAB II  | : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU; |
| BAB III | : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;              |
| BAB IV  | : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;     |
| BAB V   | : PENUTUP   |

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

*Ak*



**BAB IV  
KETENTUAN DAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 5 Agustus 2022

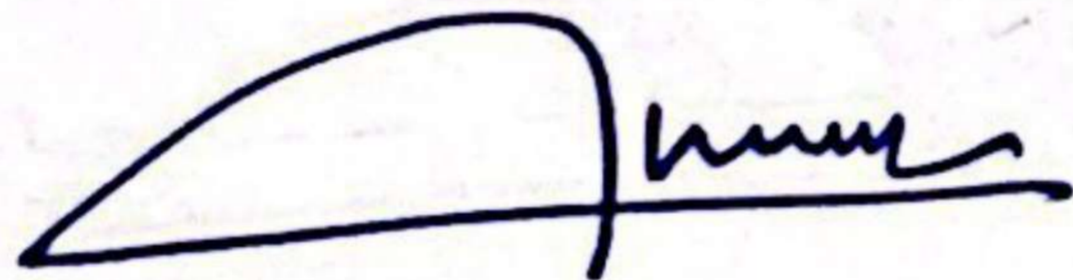
**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**



**DOLLAH MANDO**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 5 Agustus 2022

**plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



**B A S R A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 NOMOR 44**





## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT., Karena atas Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 dapat terselesaikan.

Terbitnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan acuan dan langkah awal dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Waktu, tenaga, pikiran dan kerja keras telah dicurahkan untuk terbitnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi serta sumbangsihnya dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini.

Pangkajene Sidenreng, 06 Agustus 2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



AHMAD, SP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19710604 199803 1 019

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 1          |
| 1.2. Landasan Hukum .....   | 1          |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....  | 5          |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....  | 6          |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ..</b>                       | <b>7</b>   |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian<br>Renstra SKPD ..... | 7          |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....  | 14         |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....                  | 23         |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                    | 23         |
| 2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan<br>Masyarakat .....          | 24         |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>                        | <b>40</b>  |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....                                   | 41         |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....  | 41         |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....   | 42         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>53</b>  |
| Penutup .....   | 53         |



## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2018 s/d Tahun 2022 Kabupaten Sidenreng Rappang ..... | 8  |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian .....  | 17 |
| Tabel 2.3 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang .....  | 25 |
| Tabel 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 .....   | 33 |
| Tabel 3.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang ....   | 45 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:



# RENJA 2023

## DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara



# RENJA 2023

## DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)



# RENJA 2023

## DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi



# RENJA 2023

## DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penjabaran dari Dokumen Perubahan Rencana Strategis ( Perubahan Renstra ) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;



# RENJA 2023

## DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

Adapun tujuan dari Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu.** Bab ini evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.** Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja SKPD, serta program dan kegiatan.

**Bab IV Penutup.** Bab ini memuat penutup.



### BAB II

#### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

##### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2023.

Pelaksanaan Renja tersebut terintegrasi dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

Anggaran belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 8.173.965.500,- yang terdiri dari Belanja Langsung Rp. 5.217.560.500,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 2.956.405.000,- sedangkan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.383.276.587,- (84,01%) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.788.153.473,- (94,31%) dari rencana. Dengan demikian, jika Realisasi Pendapatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 71.241.500,- maka terjadi defisit sebesar (Rp. 7,100,188,560).

Adapun keberhasilan suatu proses perencanaan akan dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak pada capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, bahan evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian s.d Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1



**Tabel 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERAKNGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nama SKPD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

| Kode                                       | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023                  | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020                             | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2021 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022) (Target APBD) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2021 s/d 2023 |  |
|--|---|--|---|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|  |   |  |   |   | Target Renja SKPD tahun 2021                                      | Realisasi Renja SKPD tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                               | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)  | 11=(10/4)                                    |
| <b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b> |   |  |   |   |   |                                 |                       |   |   |  |
| <b>3</b>                                   | <b>30</b>   | <b>01</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>Cakupan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>   | <b>100 %</b>  | <b>100 %</b>                    | <b>100 %</b>          | <b>100 %</b>  | <b>300 %</b>  | <b>300</b>                                   |
| <b>3.30</b>                                | <b>01.2</b>   | <b>01</b>  | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                | <b>Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>100 %</b>  | <b>100 %</b>                    | <b>100 %</b>          | <b>100 %</b>  | <b>300 %</b>  | <b>300</b>                                   |
| 3.30                                       | 01.2.01   | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun   | 3 Dokumen   | 3 Dokumen                       | 3 Dokumen             | 100   | 3 Dokumen   | 9 Dokumen                                    |
| 3.30                                       | 01.2.01   | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA yang disusun   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                       | 1 Dokumen             | 100   | 1 Dokumen   | 3 Dokumen                                    |
| 3.30                                       | 01.2.01   | 03   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun   | 2 Dokumen   | 2 Dokumen                       | 1 Dokumen             | 100   | 2 Dokumen   | 5 Dokumen                                    |
| 3.30                                       | 01.2.01   | 04   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA yang disusun   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                       | 1 Dokumen             | 100   | 1 Dokumen   | 3 Dokumen                                    |
| 3.30                                       | 01.2.01   | 05   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun   | 2 Dokumen   | 2 Dokumen                       | 1 Dokumen             | 100   | 2 Dokumen   | 5 Dokumen                                    |
| 3.30                                       | 01.2.01   | 06   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD yang disusun                                   | 4 Dokumen   | 4 Dokumen                       | 2 Dokumen             | 100   | 4 Dokumen   | 10 Dokumen                                   |
| <b>3.30</b>                                | <b>01.2</b>   | <b>02</b>  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>100 %</b>  | <b>100 %</b>                    | <b>100 %</b>          | <b>100 %</b>  | <b>300 %</b>  | <b>300</b>                                   |
| 3.30                                       | 01.2.02   | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN   | 12 Bulan  | 12 Bulan                        | 12 Bulan              | 100   | 12 Bulan  | 36 Bulan                                     |
| 3.30                                       | 01.2.02   | 05   | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun  | 1 Laporan   | 1 Laporan                       | 1 Laporan             | 100   | 1 Laporan   | 3 Laporan                                    |
|  |   |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>                              | <b>Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>                                | <b>100 %</b>  | <b>100 %</b>                    | <b>100 %</b>          | <b>100 %</b>  | <b>200 %</b>  | <b>200</b>                                   |
|  |   |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah   | 12 Bulan  | 12 Bulan                        | 12 Bulan              | 100   | 0 Bulan   | 24 Bulan                                     |



| Kode        | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023   | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020                  | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2021 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022) (Target APBD) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2021 s/d 2023 |  |              |     |
|-------------|---|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|--------------|-----|
|             |   |  |  |  | Target Renja SKPD tahun 2021                                      | Realisasi Renja SKPD tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |              |     |
| 1           | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7                               | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)  | 11=(10/4)                                    |              |     |
| <b>3.30</b> | <b>01.2</b>   | <b>06</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>100 %</b>  | <b>100 %</b>                    | <b>100 %</b>          | <b>100 %</b>  | <b>100 %</b>  | <b>300 %</b>                                 | <b>300</b>   |     |
| 3.30        | 01.2.06   | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan       | 20 Buah   | 15 Buah                         | 40 Buah               | 17 Buah   | 43  | 20 Buah                                      | 52 Buah      | 260 |
| 3.30        | 01.2.06   | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                         | 30 Eksamplar  | 0 Eksamplar                     | 5 Eksamplar           | 0 Eksamplar   | 0   | 30 Eksamplar                                 | 30 Eksamplar | 100 |
| 3.30        | 01.2.06   | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah                                    | 55 Kali   | 41 Kali                         | 55 Kali               | 55 Kali   | 100   | 55 Kali                                      | 151 Kali     | 275 |
|             |   |  |  | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                                   | 55 Kali   | 35 Kali                         | 55 Kali               | 55 Kali   | 100   | 55 Kali                                      | 145 Kali     | 264 |
|             |   |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>   | <b>100 %</b>  | <b>100 %</b>                    | -                     | -   | -   | -  | -            | -   |
|             |   |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah dan Jenis sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan       | 10 Buah   | 9 Buah                          | 0 Buah                | 0 Buah  | 0   | 0 Buah                                       | 0 Buah       |     |
| <b>3.30</b> | <b>01.2</b>   | <b>08</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>                          | <b>100 %</b>  | <b>100 %</b>                    | <b>100 %</b>          | <b>100 %</b>  | <b>100 %</b>  | <b>300 %</b>                                 | <b>300</b>   |     |
| 3.30        | 01.2.08   | 01   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Dokumen yang Bermaterai   | 68 lembar   | 100 lembar                      | 200 lembar            | 177 lembar  | 89  | 68 lembar                                    | 345 lembar   | 507 |
| 3.30        | 01.2.08   | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik  | 12 bulan  | 12 bulan                        | 12 bulan              | 12 bulan  | 100   | 12 bulan                                     | 36 bulan     | 300 |
| 3.30        | 01.2.08   | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 12 bulan  | 12 bulan                        | 12 bulan              | 12 bulan  | 100   | 12 bulan                                     | 36 bulan     | 300 |
|             |   |  |  | Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan   | 12 bulan  | 12 bulan                        | 12 bulan              | 12 bulan  | 100   | 12 bulan                                     | 36 bulan     | 300 |
| <b>3.30</b> | <b>01.2</b>   | <b>09</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>         | <b>100 %</b>  | <b>100 %</b>                    | <b>100 %</b>          | <b>100 %</b>  | <b>100 %</b>  | <b>300 %</b>                                 | <b>300</b>   |     |
| 3.30        | 01.2.09   | 01   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan     | 1 unit  | 1 unit                          | 1 unit                | 1 unit  | 100   | 1 unit                                       | 3 unit       | 300 |
|             |   |  |  | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara secara Rutin/Berkala                | 1 unit  | 1 unit                          | 1 unit                | 1 unit  | 100   | 1 unit                                       | 3 unit       | 300 |
| 3.30        | 01.2.09   | 02   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan | 18 unit   | 5 unit                          | 18 unit               | 5 unit  | 28  | 18 unit                                      | 28 unit      | 156 |
|             |   |  |  | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara secara Rutin/Berkala            | 18 unit   | 2 unit                          | 18 unit               | 5 unit  | 28  | 18 unit                                      | 25 unit      | 139 |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023   | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020  | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2021 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022) (Target APBD) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2021 s/d 2023 |  |     |
|------|---|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|-----|
|      |   |  |  |  | Target Renja SKPD tahun 2021                                      | Realisasi Renja SKPD tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |     |
| 1    | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7                               | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)  | 11=(10/4)                                    |     |
|      |   | Pemeliharaan Mebel                                     | Jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara secara rutin/berkala   | 10 Unit  | 0 unit  | 0 unit                          | 0 unit                | 0   | 10 Unit   | 10 Unit                                      | 100 |
| 3.30 | 01.2.09   | 09   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara  | 1 unit  | 1 unit                          | 0 unit                | 0   | 1 unit  | 2 unit                                       | 200 |
| 3.30 | 01.2.09   | 10   | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala   | 35 unit   | 4 unit                          | 27 unit               | 7   | 0 unit  | 6 unit                                       | 17  |
| 3    | 30  | 02   | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>  | <b>Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kepemilikan izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)</b> | <b>100 %</b>  |                                 | <b>90 %</b>           | <b>90 %</b>   | <b>100</b>  | <b>100 %</b>                                 |     |
| 3.30 | 02.2  | 01   | <b>Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>   | <b>Persentase Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>  | <b>100 %</b>  |                                 | <b>90 %</b>           | <b>90 %</b>   | <b>100</b>  | <b>100 %</b>                                 |     |
| 3.30 | 02.2.01   | 01   | Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Pengawasan Perizinan dan Pembinaan Pelaku Usaha   | 110 Unit  | 40 Unit                         | 90 Unit               | 100   | 100 Unit  | 230 Unit                                     | 209 |
| 3    | 30  | 03   | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>   | <b>Persentase sarana dan prasarana Distribusi perdagangan yang memadai</b>   | <b>6.2 %</b>  | <b>12.5 %</b>                   | <b>90 %</b>           | <b>90 %</b>   | <b>100</b>  | <b>100 %</b>                                 |     |
| 3.30 | 03.2  | 01   | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>   | <b>Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distrbusi Perdagangan</b>   | <b>6.2 %</b>  | <b>12.5 %</b>                   | <b>90 %</b>           | <b>90 %</b>   | <b>100</b>  | <b>100 %</b>                                 |     |
| 3.30 | 03.2.01   | 01   | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Pasar Rakyat yang Dibangun dan Direvitalisasi  | 1 Unit  | 2 Unit                          | 1 Unit                | 100   | 1 Unit  | 4 Unit                                       | 400 |
|      |   |  | Pembangunan/ Rehabilitasi Gudang SRG   |  | 1 Unit  |                                 |                       |   | - Unit  | - Unit                                       | -   |
|      |   |  | Cakupan Bantuan Sarana Usaha Perdagangan (PKL dan Asongan)   |  | 100 Kelompok  |                                 |                       |   | - Kelompok  | - Kelompok                                   | -   |
| 3    | 30  | 04   | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>   | <b>Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya</b>   | <b>100 %</b>  |                                 |                       |   | <b>100 %</b>  |  |     |
| 3.30 | 04.2  | 01   | <b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>   | <b>Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar</b>   | <b>1 Kegiatan</b>   |                                 |                       |   | <b>1 Kegiatan</b>   |  |     |
| 3.30 | 04.2.01   | 01   | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat   | Jumlah Operasi Pasar pada Waktu Tertentu   | 1 Kegiatan  | 0 Kegiatan                      |                       |   | 1 Kegiatan  | 1 Kegiatan                                   | 100 |



| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023  | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020                              | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2021 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022) (Target APBD) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2021 s/d 2023 |  |                 |     |
|------|---|--|---|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|-----------------|-----|
|      |   |  |   |  | Target Renja SKPD tahun 2021                                      | Realisasi Renja SKPD tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |                 |     |
| 1    | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7                               | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)  | 11=(10/4)                                    |                 |     |
| 3.30 | 04.2  | 02   | <b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>                         | <b>Cakupan Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal</b>   | 60 Laporan  | 48 Laporan                      | 48 Laporan            | 48 Laporan  | 100   | - Laporan                                    | 96 Laporan      | 160 |
| 3.30 | 04.2.02   | 01   | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah pemantauan harga dan stok bahan pokok dipasaran   | 48 Laporan  | 48 Laporan                      | 48 Laporan            | 48 Laporan  | 100   | - Laporan                                    | 96 Laporan      | 200 |
|      |   |  |   | Jumlah pengawasan secara berkala penyaluran Gas LPG bersubsidi di tingkat Agen dan Pangkalan             | 12 Laporan  | - Laporan                       |                       |   |   | - Laporan                                    | - Laporan       | -   |
| 3.30 | 04.2  | 03   | <b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Cakupan Intensitas Pengawasan Penyaluran Pupuk/ Pestisida Bersubsidi</b>                              | 12 Laporan  | - Laporan                       |                       |   | 12 Laporan  | 12 Laporan                                   | 12 Laporan      | 100 |
| 3.30 | 04.2.03   | 01   | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi   | Jumlah Pengawasan Secara Berkala Penyaluran Pupuk / Pestisida Bersubsidi di Tingkat Distributor dan Kios | 12 Laporan  | - Laporan                       |                       |   | 12 Laporan  | 12 Laporan                                   | 12 Laporan      | 100 |
| 3    | 30  | 06   | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>  | <b>Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar Ukuran</b>   | 100 %   | 100 %                           | 95 %                  | 49.82 %   | 100   | 97.50 %                                      | 247 %           | 247 |
| 3.30 | 06.2  | 01   | <b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>   | <b>Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan</b>        | 100 %   | 100 %                           | 95 %                  | 49.82 %   | 100   | 97.50 %                                      | 247 %           | 247 |
| 3.30 | 06.2.01   | 01   | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang  | Jumlah Pelayanan Tera/ Tera Ulang  | 4,000 Alat UTTP   | 1,303 Alat UTTP                 | 3,800 Alat UTTP       | 1,740 Alat UTTP   | 46  | 3,900 Alat UTTP                              | 6,943 Alat UTTP | 174 |
| 3.30 | 06.2.01   | 02   | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal   | Jumlah Alat UTTP diawasi yang sesuai dengan standar ukuran   | 4 Laporan   | 3 Laporan                       | 4 Laporan             | 4 Laporan   | 100   | 4 Laporan                                    | 11 Laporan      | 275 |
|      |   |  |   | Jumlah Peningkatan Pengetahuan pelaku usaha/ pemilik UTTP tentang peraturan kemetrolagian                | 100 Orang   | 200 Orang                       | 100 Orang             | 100 Orang   | 100   | 100 Orang                                    | 400 Orang       | 400 |
| 3.30 | 06.2.01   | 03   | Penyidikan Metrologi Legal  | Jumlah SDM yang kompeten dalam Kegiatan Metrologi Legal  | 4 Orang   | 1 Orang                         | 4 Orang               | 4 Orang   | 100   | - Orang                                      | 5 Orang         | 125 |
| 3    | 30  | 07   | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>   | <b>Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri</b>         | 50 %  | 0 %                             | 7.14 %                | 7.14 %  | 100   | 0.00 %                                       | 7.14 %          | 14  |
| 3.30 | 07.2  | 01   | <b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>  | <b>Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri</b>                        | 50 %  | 0 %                             | 7.14 %                | 7.14 %  | 100   | 0.00 %                                       | 7.14 %          | 14  |
| 3.30 | 07.2.01   | 01   | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota  | Jumlah Pelaksanaan Pameran Produk lokal UMKM dan IKM kab. Sidrap   | 1 Kegiatan  | - Kegiatan                      |                       |   |   |  |                 |     |
| 3.30 | 07.2.01   | 03   | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan   | Jumlah sistem informasi usaha Perdagangan  | 1 Kegiatan  | - Kegiatan                      | 1 Kegiatan            | 1 Kegiatan  | 100   | - Kegiatan                                   | 1 Kegiatan      | 100 |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)                   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023                         | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020                                    | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2021 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022) (Target APBD) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2021 s/d 2023 |  |                 |       |
|------|---|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|-----------------|-------|
|      |   |  |  |  | Target Renja SKPD tahun 2021                                      | Realisasi Renja SKPD tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |                 |       |
| 1    | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7                               | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)  | 11=(10/4)                                    |                 |       |
|      |   | Jumlah data base pelaku usaha perdagangan                                | 1 Kegiatan   | - Kegiatan   |   |                                 |                       | - Kegiatan  | 0 Kegiatan  | -  |                 |       |
|      |   | Jumlah sarana informasi harga bahan pokok secara digital di pasar type A | 1 Unit   | - Unit   |   |                                 |                       | - Unit  | 0 Unit  | -  |                 |       |
|      |   | <b>BIDANG PERINDUSTRIAN</b>  |  |  |   |                                 |                       |   |   |  |                 |       |
| 3    | 31  | 02   | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>  | <b>Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan</b>   | 20.52 %   | 8.38 %                          | 20.04 %               | 31.91 %   | 159.2   | 20.28 %                                      | 61 %            | 295   |
| 3.31 | 02.2  | 01   | <b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>                   | <b>Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri</b>  | 20.52 %   | 8.38 %                          | 20.04 %               | 31.91 %   | 159.2   | 20.28 %                                      | 61 %            | 295   |
| 3.31 | 02.2.01   | 03   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                   | Jumlah Pemberian Fasilitas Akses Perbankan bagi IKM  | 25 IKM  | - IKM                           |                       |   |   | - IKM  | 0 IKM           | -     |
|      |   |  |  | Jumlah Pengembangan Jaringan IKM dalam Bentuk Pembinaan, Promosi, Pameran, Rakerda, Rakerwil, Dekranasda Award | 3 Kali Pameran  | 1 Pelaku Pengrajin dibina       | 50 Kali Pameran       | 50 Kali Pameran   | 100   | 0 Kali Pameran                               | 50 Kali Pameran | 1,667 |
| 3.31 | 02.2.01   | 04   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri          | Jumlah Pengembangan Sentra IKM   | 3 Paket   | 0 Paket                         |                       |   |   | 1 Paket                                      | 1 Paket         | 33    |
|      |   |  |  | Jumlah Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri   | 65 Kelompok IKM   | 12 Kelompok IKM                 | 28 Kelompok IKM       | 29 Kelompok IKM   | 104   | 60 Kelompok IKM                              | 89 Kelompok IKM | 137   |
|      |   |  |  | Jumlah dokumen pola pengembangan sentra industri   | 1 Dokumen   | 0 Dokumen                       |                       |   |   | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen       | 100   |
|      |   |  |  | Jumlah dokumen DED sentra industri   | 1 Dokumen   | 0 Dokumen                       |                       |   |   | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen       | 100   |
|      |   |  |  | Jumlah Peralatan Sentra IKM  | 1 Paket   | 0 Paket                         |                       |   |   | 1 Paket                                      | 1 Paket         | 100   |
|      |   |  |  | Luas Lahan Pengembangan Sentra Industri  | 1 Ha  | 0 Ha                            |                       |   |   | 1 Ha   | 1 Ha            | 100   |
| 3.31 | 02.2.01   | 05   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat   | Jumlah Kelompok Pengrajin Industri yang Dibina dan Dibimbing   | 3 Kelompok  | 0 Kelompok                      |                       |   |   | 0 Kelompok                                   | 0 Kelompok      | -     |
|      |   |  |  | Jumlah Pelatihan Teknologi Industri  | 30 Orang  | 0 Orang                         | 100 Orang             | 100 Orang   | 100   | 0 Orang                                      | 100 Orang       | 333   |
| 3.31 | 02.2.01   | 06   | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                   | Jumlah kelompok IKM yang dibina  | 1 Kali  | 1 Kali                          | 1 Kali                | 1 Kali  | 100   | 0 Kali                                       | 1 Kali          | 100   |
| 3    | 31  | 04   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>                                | <b>Pertumbuhan IKM</b>   | 1 %   | 0 %                             | 1 %                   | 0.99 %  | 99  | 1 %  | 2 %             | 199   |
| 3.31 | 04.2  | 01   | <b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | <b>Cakupan Penyediaan Sarana Informasi Industri</b>  | 1 %   | 0 %                             | 1 %                   | 0.99 %  | 99  | 1 %  | 2 %             | 199   |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023  | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2021 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022) (Target APBD) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2021 s/d 2023 |  |           |     |
|------|---|--|---|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|-----------|-----|
|      |   |  |   |   | Target Renja SKPD tahun 2021                                      | Realisasi Renja SKPD tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |           |     |
| 1    | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                               | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)  | 11=(10/4)                                    |           |     |
| 3.31 | 04.2.01   | 01   | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Sarana Informasi IKM yang Dapat Diakses Pemangku Kepentingan         | 1 Laporan   | 0 Laporan                       | 1 Laporan             | 1 Laporan   | 100   | 1 Laporan                                    | 2 Laporan | 200 |



### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Secara kelembagaan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah. Untuk mengukur Kinerja Pelayanan SKPD, maka dapat dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis Lingkungan Strategis yaitu Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diembang oleh lembaga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan SKPD, memerlukan :

#### 2.1.1. Lingkungan Strategis

Pengertian Lingkungan Strategis adalah faktor yang dapat membawa pengaruh terhadap Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Organisasi khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Lingkungan Strategis dibagi dua yaitu Instrumental Input dan Emviromental Input. Instrumental Input berkenaan dengan instrument yang berpengaruh langsung secara internal dan dapat berupa kelemahan yang perlu diberikan solusi yang tepat sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi. Enveromental Input berkaitan dengan kebijakan atau Political Will dan faktor eksternal yang merupakan faktor yang tidak dapat diubah melainkan disiasati apabila berbentuk ancaman. Demikian pula dengan lingkungan strategis dianalisis berdasarkan instrumental serta emviromental input.

#### 2.1.2. Analisa Lingkungan Internal

Lingkungan Internal merupakan Variabel lingkungan yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kinerja pada Unit Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam batas-batas tertentu diupayakan secara maksimal



sehingga mampu dikendalikan dalam optimalisasi pencapaian kinerja dan tentunya untuk mewujudkan visi dan misi Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Selain itu, tersedianya Sumber Daya Manusia/Aparatur serta Sumber Daya Material berupa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian saat ini meskipun masih jauh dari memadai, namun tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan dukungan dan motivasi kerja aparatur yang tinggi dalam melaksanakan tugas pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

### **2.1.3. Analisa Lingkungan Eksternal**

Lingkungan Eksternal Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu Variabel yang turut mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja aparatur, akan tetapi pengelolaan atau pengendaliannya diluar kendali Unit Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Jika faktor lingkungan eksternal ini mempunyai pengaruh atau berdampak negatif terhadap optimalisasi pencapaian kinerja aparatur maka harus dapat disiasati dalam rangka mendukung kelancaran dan meningkatkan kinerja unit Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan bagian bentuk Peraturan Perundang-undangan yang secara eksternal memiliki pengaruh signifikan serta membawa dampak yang luas terhadap penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian,



## **RENJA 2023**

### **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan cara menyikapi desentralisasi kewenangan dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam hal pembinaan dan pengembangan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Kemetrolagian serta hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal Pembangunan.

Secara umum analisa kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

| No. | Indikator   | SPM/             | IKK | Target Renstra SKPD |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis |            |
|-----|---|------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
|     |   | Standar Nasional |     | Satuan              | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024        | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |
| 1   | 2   | 3                | 4   |                     | 5          | 6          | 7          | 8                 | 9          | 10         | 11         | 12               | 13         |
|     | <b><u>Bidang Sekretariat</u></b>  |                  |     |                     |            |            |            |                   |            |            |            |                  |            |
|     | <b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                  |     |                     |            |            |            |                   |            |            |            |                  |            |
|     | <b>Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b> |                  |     | <b>Persen</b>       | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>        | <b>100</b> | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>100</b>       |            |
|     | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun   |                  |     | Dokumen             | 3          | 3          | 3          | 3                 | 3          | 0          | 3          | 3                |            |
|     | Jumlah Dokumen RKA yang disusun   |                  |     | Dokumen             | 1          | 1          | 1          | 1                 | 1          | 0          | 1          | 1                |            |
|     | Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun   |                  |     | Dokumen             | 1          | 2          | 2          | 2                 | 2          | 0          | 2          | 2                |            |
|     | Jumlah Dokumen DPA yang disusun   |                  |     | Dokumen             | 1          | 1          | 1          | 1                 | 1          | 0          | 1          | 1                |            |
|     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun   |                  |     | Dokumen             | 1          | 2          | 2          | 2                 | 2          | 0          | 2          | 2                |            |
|     | Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD yang disusun                                   |                  |     | Laporan             | 2          | 4          | 4          | 4                 | 4          | 0          | 4          | 4                |            |
|     | <b>Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |                  |     | <b>Persen</b>       | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>        | <b>100</b> | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>100</b>       |            |
|     | Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN   |                  |     | Bulan               | 12         | 12         | 12         | 12                | 12         | 0          | 12         | 12               |            |
|     | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun  |                  |     | Laporan             | 1          | 1          | 1          | 1                 | 1          | 0          | 1          | 1                |            |
|     | <b>Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>                                |                  |     | <b>Persen</b>       | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>100</b>       |            |
|     | Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah   |                  |     | Bulan               | 0          | 12         | 12         | 12                | 0          | 0          | 12         | 12               |            |
|     | <b>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |                  |     | <b>Persen</b>       | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>        | <b>100</b> | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>100</b>       |            |



| No. | Indikator  | SPM/<br>Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis |            |
|-----|--|--------------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
|     |  |                          |     | Satuan              | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024        | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |
|     | Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan   |                          |     | Buah                | 40         | 20         | 20         | 20                | 17         | 0          | 20         | 20               |            |
|     | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                     |                          |     | Eksemplar           | 5          | 30         | 30         | 30                | 0          | 0          | 30         | 30               |            |
|     | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah                                |                          |     | Kali                | 55         | 55         | 55         | 55                | 55         | 0          | 55         | 55               |            |
|     | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                               |                          |     | Kali                | 55         | 55         | 55         | 55                | 55         | 0          | 55         | 55               |            |
|     | <b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>   |                          |     | <b>Persen</b>       | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>100</b>       |            |
|     | Jumlah dan Jenis sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang Diadakan   |                          |     | Buah                | 0          | 10         | 10         | 10                | 0          | 0          | 10         | 10               |            |
|     | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                      |                          |     | <b>Persen</b>       | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>        | <b>100</b> | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>100</b>       |            |
|     | Jumlah Dokumen yang Bermaterai   |                          |     | Lembar              | 200        | 68         | 68         | 68                | 177        | 0          | 68         | 68               |            |
|     | Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi , SDA dan Listrik                                       |                          |     | Bulan               | 12         | 12         | 12         | 12                | 12         | 0          | 12         | 12               |            |
|     | Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                          |     | Bulan               | 12         | 12         | 12         | 12                | 12         | 0          | 12         | 12               |            |
|     | Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan   |                          |     | Bulan               | 12         | 12         | 12         | 12                | 12         | 0          | 12         | 12               |            |
|     | <b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>     |                          |     | <b>Persen</b>       | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>        | <b>100</b> | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>100</b>       |            |
|     | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan |                          |     | Unit                | 1          | 1          | 1          | 1                 | 1          | 0          | 1          | 1                |            |
|     | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara secara Rutin/Berkala            |                          |     | Unit                | 1          | 1          | 1          | 1                 | 1          | 0          | 1          | 1                |            |



| No. | Indikator   | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra SKPD |               |               |               | Realisasi Capaian |               | Proyeksi      |               | Catatan<br>Analisis |               |
|-----|---|-----------------------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
|     |   |                             |     | Satuan              | Tahun<br>2021 | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024     | Tahun<br>2021 | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 |                     | Tahun<br>2024 |
|     | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan  |                             |     | Unit                | 18            | 18            | 18            | 18                | 5             | 0             | 18            | 18                  |               |
|     | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara secara Rutin/Berkala   |                             |     | Unit                | 18            | 18            | 18            | 18                | 5             | 0             | 18            | 18                  |               |
|     | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dipelihara secara rutin/berkala  |                             |     | Unit                | 0             | 10            | 10            | 10                | 0             | 0             | 10            | 10                  |               |
|     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara   |                             |     | Unit                | 1             | 1             | 1             | 1                 | 0             | 0             | 1             | 1                   |               |
|     | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala  |                             |     | Unit                | 27            | 23            | 23            | 23                | 2             | 0             | 23            | 23                  |               |
|     | <b><u>Bidang Perdagangan</u></b>  |                             |     |                     |               |               |               |                   |               |               |               |                     |               |
|     | <b>Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kepemilikan izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)</b> |                             |     | <b>Persen</b>       | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>        | <b>90</b>     | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>          |               |
|     | <b>Persentase Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>   |                             |     | <b>Persen</b>       | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>        | <b>90</b>     | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>          |               |
|     | Jumlah Pengawasan Perizinan dan Pembinaan Pelaku Usaha  |                             |     | Unit                | 90            | 100           | 110           | 110               | 90            | 0             | 110           | 110                 |               |
|     | <b>persentase sarana dan prasarana Distribusi perdagangan yang memadai</b>  |                             |     | <b>Persen</b>       | <b>6.2</b>    | <b>6.2</b>    | <b>6.2</b>    | <b>6.2</b>        | <b>6.2</b>    | <b>0</b>      | <b>6.2</b>    | <b>6.2</b>          |               |
|     | <b>Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>   |                             |     | <b>Persen</b>       | <b>6.2</b>    | <b>6.2</b>    | <b>6.2</b>    | <b>6.2</b>        | <b>6.2</b>    | <b>0</b>      | <b>6.2</b>    | <b>6.2</b>          |               |
|     | Pasar Rakyat yang Dibangun dan Direvitalisasi   |                             |     | Unit                | 1             | 1             | 1             | 1                 | 1             | 0             | 1             | 1                   |               |



| No. | Indikator  | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra SKPD |               |               |               | Realisasi Capaian |               | Proyeksi      |               | Catatan<br>Analisis |               |
|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
|     |  |                             |     | Satuan              | Tahun<br>2021 | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024     | Tahun<br>2021 | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 |                     | Tahun<br>2024 |
|     | Pembangunan/ Rehabilitasi Gudang SRG   |                             |     | Unit                | 0             | 1             | 1             | 1                 | 0             | 0             | 1             | 1                   |               |
|     | Cakupan Bantuan Sarana Usaha Perdagangan (PKL dan Asongan)   |                             |     | Kelompok            | 0             | 100           | 100           | 100               | 0             | 0             | 100           | 100                 |               |
|     | <b>Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya</b>                     |                             |     | <b>Persen</b>       | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>          |               |
|     | <b>Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar</b>   |                             |     | <b>Kegiatan</b>     | <b>0</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>            |               |
|     | Jumlah Operasi Pasar pada Waktu Tertentu   |                             |     | Kegiatan            | 0             | 1             | 1             | 1                 | 0             | 0             | 1             | 1                   |               |
|     | <b>Cakupan Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal</b>   |                             |     | <b>Laporan</b>      | <b>48</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>         | <b>48</b>     | <b>0</b>      | <b>60</b>     | <b>60</b>           |               |
|     | Jumlah pemantauan harga dan stok bahan pokok dipasaran   |                             |     | Laporan             | 48            | 48            | 48            | 48                | 48            | 0             | 48            | 48                  |               |
|     | Jumlah pengawasan secara berkala penyaluran Gas LPG bersubsidi di tingkat Agen dan Pangkalan             |                             |     | Laporan             | 0             | 12            | 12            | 12                | 0             | 0             | 12            | 12                  |               |
|     | <b>Cakupan Intensitas Pengawasan Penyaluran Pupuk/ Pesticida Bersubsidi</b>                              |                             |     | <b>Persen</b>       | <b>0</b>      | <b>12</b>     | <b>12</b>     | <b>12</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>12</b>     | <b>12</b>           |               |
|     | Jumlah Pengawasan Secara Berkala Penyaluran Pupuk / Pesticida Bersubsidi di Tingkat Distributor dan Kios |                             |     | Laporan             | 0             | 12            | 12            | 12                | 0             | 0             | 12            | 12                  |               |
|     | <b>Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar Ukuran</b>   |                             |     | <b>Persen</b>       | <b>95</b>     | <b>97.5</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>        | <b>49.82</b>  | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>          |               |
|     | <b>Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan</b>        |                             |     | <b>Persen</b>       | <b>95</b>     | <b>97.5</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>        | <b>49.82</b>  | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>          |               |
|     | Jumlah Pelayanan Tera/ Tera Ulang  |                             |     | Alat UTTP           | 3800          | 3900          | 4000          | 4000              | 1740          | 0             | 4000          | 4000                |               |
|     | Jumlah Alat UTTP diawasi yang sesuai dengan standar ukuran   |                             |     | Laporan             | 4             | 4             | 4             | 4                 | 4             | 0             | 4             | 4                   |               |



| No. | Indikator  | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra SKPD     |               |               |               | Realisasi Capaian |               | Proyeksi      |               | Catatan<br>Analisis |               |
|-----|--|-----------------------------|-----|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
|     |  |                             |     | Satuan                  | Tahun<br>2021 | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024     | Tahun<br>2021 | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 |                     | Tahun<br>2024 |
|     | Jumlah Peningkatan Pengetahuan pelaku usaha/ pemilik UTTP tentang peraturan kemetrolagian                      |                             |     | Orang                   | 100           | 100           | 100           | 100               | 100           | 0             | 100           | 100                 |               |
|     | Jumlah SDM yang kompeten dalam Kegiatan Metrologi Legal  |                             |     | Orang                   | 4             | 4             | 4             | 4                 | 4             | 0             | 4             | 4                   |               |
|     | <b>Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri</b>               |                             |     | <b>Persen</b>           | <b>7.14</b>   | <b>33.33</b>  | <b>50</b>     | <b>50</b>         | <b>7.14</b>   | <b>0</b>      | <b>50</b>     | <b>50</b>           |               |
|     | <b>Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri</b>                              |                             |     | <b>Persen</b>           | <b>7.14</b>   | <b>33.33</b>  | <b>50</b>     | <b>50</b>         | <b>7.14</b>   | <b>0</b>      | <b>50</b>     | <b>50</b>           |               |
|     | Jumlah Pelaksanaan Pameran Produk lokal UMKM dan IKM kab. Sidrap   |                             |     | Kegiatan                | 0             | 0             | 1             | 1                 | 0             | 0             | 1             | 1                   |               |
|     | Jumlah sistem informasi usaha Perdagangan  |                             |     | Kegiatan                | 0             | 1             | 1             | 1                 | 0             | 0             | 1             | 1                   |               |
|     | Jumlah data base pelaku usaha perdagangan  |                             |     | Kegiatan                | 1             | 1             | 1             | 1                 | 1             | 0             | 1             | 1                   |               |
|     | Jumlah sarana informasi harga bahan pokok secara digital di pasar type A                                       |                             |     | Kegiatan                | 0             | 1             | 1             | 1                 | 0             | 0             | 1             | 1                   |               |
|     | <b>Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan</b>   |                             |     | <b>Persen</b>           | <b>20.04</b>  | <b>20.28</b>  | <b>20.52</b>  | <b>20.52</b>      | <b>31.91</b>  | <b>0</b>      | <b>20.52</b>  | <b>20.52</b>        |               |
|     | <b>Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri</b>  |                             |     | <b>Persen</b>           | <b>20.04</b>  | <b>20.28</b>  | <b>20.52</b>  | <b>20.52</b>      | <b>31.91</b>  | <b>0</b>      | <b>20.52</b>  | <b>20.52</b>        |               |
|     | Jumlah Pemberian Fasilitas Akses Perbankan bagi IKM  |                             |     | IKM                     | 0             | 25            | 25            | 25                | 0             | 0             | 25            | 25                  |               |
|     | Jumlah Pengembangan Jaringan IKM dalam Bentuk Pembinaan, Promosi, Pameran, Rakerda, Rakerwil, Dekranasda Award |                             |     | Pelaku Pengrajin dibina | 50            | 3             | 3             | 3                 | 50            | 0             | 3             | 3                   |               |
|     | Jumlah Pengembangan Sentra IKM   |                             |     | Paket                   | 0             | 1             | 3             | 3                 | 0             | 0             | 3             | 3                   |               |



| No. | Indikator   | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra SKPD |               |               |               | Realisasi Capaian |               | Proyeksi      |               | Catatan<br>Analisis |               |
|-----|---|-----------------------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
|     |   |                             |     | Satuan              | Tahun<br>2021 | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024     | Tahun<br>2021 | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 |                     | Tahun<br>2024 |
|     | Jumlah Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri          |                             |     | Kelompok IKM        | 28            | 60            | 65            | 65                | 29            | 0             | 65            | 65                  |               |
|     | Jumlah dokumen pola pengembangan sentra industri                    |                             |     | Dokumen             | 0             | 1             | 0             | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0                   |               |
|     | Jumlah dokumen DED sentra industri                                  |                             |     | Dokumen             | 1             | 1             | 0             | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0                   |               |
|     | Jumlah Peralatan Sentra IKM   |                             |     | Paket               | 0             | 1             | 1             | 1                 | 0             | 0             | 1             | 1                   |               |
|     | Luas Lahan Pengembangan Sentra Industri                             |                             |     | Ha                  | 0             | 1             | 1             | 1                 | 0             | 0             | 1             | 1                   |               |
|     | Jumlah Kelompok Pengrajin Industri yang Dibina dan Dibimbing        |                             |     | Kelompok            | 0             | 3             | 3             | 3                 | 0             | 0             | 3             | 3                   |               |
|     | Jumlah Pelatihan Teknologi Industri                                 |                             |     | Orang               | 100           | 30            | 30            | 30                | 100           | 0             | 30            | 30                  |               |
|     | Jumlah kelompok IKM yang dibina                                     |                             |     | Kali                | 1             | 1             | 1             | 1                 | 1             | 0             | 1             | 1                   |               |
|     | <b>Pertumbuhan IKM</b>  |                             |     | <b>Persen</b>       | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>          | <b>0.99</b>   | <b>0</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>            |               |
|     | <b>Cakupan Penyediaan Sarana Informasi Industri</b>                 |                             |     | <b>Laporan</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>          | <b>1</b>      | <b>0</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>            |               |
|     | Jumlah Sarana Informasi IKM yang Dapat Diakses Pemangku Kepentingan |                             |     | Laporan             | 1             | 1             | 1             | 1                 | 1             | 0             | 1             | 1                   |               |



### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Belum tersedianya database usaha perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang,
2. Kecenderungan masyarakat menggunakan produk luar sehingga perlunya peningkatan keinginan masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri,
3. Perlunya peningkatan SDM IKM dan kelompok masyarakat,
4. Perlunya peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar informasi tentang pelatihan IKM semakin meluas,
5. Tingkat Kesadaran masyarakat tentang metrologi legal masih minim, dan
6. Kurangnya SDM kemetrologian.

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD sangat dibutuhkan dalam merumuskan perencanaan baik pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan program dan kegiatan yang matang dan tentunya bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Sistem Perencanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan di Indoneia dikenal dengan adanya Perencanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) artinya memungkinkan menggali ide-ide dan gagasan masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan. Sistem perencanaan dengan metode tersebut dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
2. Perencanaan metode dari atas kebawah (top down planning) untuk memungkinkan terjadinya perpaduan antara perumusan Kebijakan Pemerintah dan Keinginan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.



# RENJA 2023

## DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Dengan terjadinya proses perencanaan tersebut, maka kita membandingkan antara Rancangan awal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi SKPD saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Masyarakat khususnya terkait dengan pengembangan perdagangan, perindustrian, dan kemetrolgian, sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

**Tabel 2.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nama SKPD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

| No.   | Rancangan Awal RKPd   |                      |  |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan  |                      |  |                |                     | Catatan Penting |
|-------|---|----------------------|--|----------------|----------------|---|----------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
|       | Program/ Kegiatan   | Lokasi               | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan  | Lokasi               | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1     | 2   | 3                    | 4  | 5              | 6              | 7   | 8                    | 9  | 10             | 11                  | 12              |
| 1.    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                      | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                | 4,602,476,121  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Pangkajene Sidenreng | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                | 3,654,931,000       |                 |
| 1.1.  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Pangkajene Sidenreng | Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 100 persen     | 15,150,000     | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Pangkajene Sidenreng | Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 100 persen     | 14,875,000          |                 |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun  | 3 dokumen      | 4,040,000      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun  | 3 dokumen      | 4,913,000           |                 |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Dokumen RKA yang disusun  | 1 dokumen      | 2,525,000      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Dokumen RKA yang disusun  | 1 dokumen      | 3,018,000           |                 |
| 1.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun  | 2 dokumen      | 2,525,000      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun  | 2 dokumen      | 1,755,000           |                 |
| 1.1.4 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Dokumen DPA yang disusun  | 1 dokumen      | 2,020,000      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Dokumen DPA yang disusun  | 1 dokumen      | 1,710,000           |                 |
| 1.1.5 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                  | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun  | 2 dokumen      | 2,020,000      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                  | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun  | 2 dokumen      | 1,769,000           |                 |
| 1.1.6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD yang disusun                            | 4 dokumen      | 2,020,000      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD yang disusun                            | 4 dokumen      | 1,710,000           |                 |
| 1.2   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Pangkajene Sidenreng | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 persen     | 4,027,848,741  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Pangkajene Sidenreng | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 persen     | 3,075,772,000       |                 |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Pangkajene Sidenreng | Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  | 12 bulan       | 4,025,828,741  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Pangkajene Sidenreng | Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  | 12 bulan       | 3,074,022,000       |                 |
| 1.2.5 | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Pangkajene Sidenreng | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun   | 1 dokumen      | 2,020,000      | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Pangkajene Sidenreng | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun   | 1 dokumen      | 1,750,000           |                 |
| 1.3   | Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah                                     | Pangkajene Sidenreng | Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah                                | 100 persen     | 15,150,000     |   |                      |  |                |                     |                 |
| 1.3.2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | Pangkajene Sidenreng | Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah  | 12 bulan       | 15,150,000     |   |                      |  |                |                     |                 |



| No.    | Rancangan Awal RKPD  |                      |  |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan   |  |  |                |                     | Catatan Penting |
|--------|--|----------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------------|-----------------|
|        | Program/ Kegiatan  | Lokasi               | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan   | Lokasi   | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1.6    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | Pangkajene Sidenreng | <b>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              | 100            | 111,403,000    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | Pangkajene Sidenreng                                       | <b>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              | 100            | 175,856,100         |                 |
| 1.6.1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 20 buah        | 1,515,000      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Pangkajene Sidenreng                                       | Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 20 buah        | 1,045,600           |                 |
| 1.6.6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                   | 30 exemplar    | 1,818,000      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Pangkajene Sidenreng                                       | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                   | 30 exemplar    | 1,500,000           |                 |
| 1.6.9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah                              | 55 kali        | 108,070,000    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Pangkajene Sidenreng                                       | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah                              | 55 kali        | 173,310,500         |                 |
|        |  | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                             | 55 kali        |                | Pangkajene Sidenreng   | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 55 kali  |                |                     |                 |
| 1.7    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | Pangkajene Sidenreng | <b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>   | 100 persen     | 16,160,000     |  |  |  |                |                     |                 |
| 1.7.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan Jenis sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang Diadakan | 10 Buah        | 16,160,000     |  |  |  |                |                     |                 |
| 1.8    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Pangkajene Sidenreng | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                    | 100 persen     | 314,827,100    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Pangkajene Sidenreng                                       | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                    | 100 persen     | 337,244,900         |                 |
| 1.8.1  | Penyediaan Jasa Surat Meyurat  | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Dokumen yang Bermaterai   | 68 lembar      | 1,262,500      | Penyediaan Jasa Surat Meyurat  | Pangkajene Sidenreng                                       | Jumlah Dokumen yang Bermaterai   | 68 lembar      | 1,505,000           |                 |
| 1.8.2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Pangkajene Sidenreng | Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik                                      | 12 bulan       | 57,327,600     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Pangkajene Sidenreng                                       | Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik                                      | 12 bulan       | 56,760,000          |                 |
| 1.8.4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Pangkajene Sidenreng | Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 12 bulan       | 256,237,000    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Pangkajene Sidenreng                                       | Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 12 bulan       | 278,979,900         |                 |
|        |  | Pangkajene Sidenreng | Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan   | 12 bulan       |                | Pangkajene Sidenreng   | Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan                           | 12 bulan   |                |                     |                 |
| 1.9    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Pangkajene Sidenreng | <b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | 100 persen     | 101,937,280    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Pangkajene Sidenreng                                       | <b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | 100 persen     | 51,183,000          |                 |

| No.    | Rancangan Awal RKPD  |                      |  |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan   |                      |  |                |                     | Catatan Penting |
|--------|--|----------------------|--|----------------|----------------|--|----------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
|        | Program/ Kegiatan  | Lokasi               | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan   | Lokasi               | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1.9.1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan     | 1 unit         | 31,209,000     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan     | 1 unit         | 36,400,000          |                 |
|        |  | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara secara Rutin/Berkala                | 1 unit         |                |  | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara secara Rutin/Berkala                | 1 unit         |                     |                 |
| 1.9.2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan | 18 unit        | 17,703,280     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan | 18 unit        | 12,028,000          |                 |
|        |  | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara secara Rutin/Berkala            | 18 unit        |                |  | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara secara Rutin/Berkala            | 18 unit        |                     |                 |
| 1.9.5  | Pemeliharaan Mebel   | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dipelihara secara rutin/berkala                               | 10 unit        | 10,100,000     |  |                      |  |                |                     |                 |
| 1.9.9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara                                    | 1 unit         | 28,280,000     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Pangkajene Sidenreng | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara                                    | 1 unit         | 2,755,000           |                 |
| 1.9.10 | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala                    | 23 unit        | 14,645,000     |  |                      |  |                |                     |                 |
|        |  | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala                       | 12 unit        |                |  |                      |  |                |                     |                 |



| No.             | Rancangan Awal RKPD  |             |  |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan   |             |  |                |                     | Catatan Penting |
|-----------------|--|-------------|--|----------------|----------------|--|-------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
|                 | Program/ Kegiatan  | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 3-30            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN   |             |  |                | 4,223,729,000  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN   |             |  |                | 3,376,874,000       |                 |
| 3-30.02         | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN   | Kab. Sidrap | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kepemilikan izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | 100 Persen     | 18,180,000     | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN   | Kab. Sidrap | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kepemilikan izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | 100 Persen     | 7,253,000           |                 |
| 3-30.02.2.01    | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan   | Kab. Sidrap | Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan  | 100 Persen     | 18,180,000     | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan   | Kab. Sidrap | Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan  | 100 Persen     | 7,253,000           |                 |
| 3-30.02.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kab. Sidrap | Jumlah Pengawasan Perizinan dan Pembinaan Pelaku Usaha   | 110 Unit       | 18,180,000     | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kab. Sidrap | Jumlah Pengawasan Perizinan dan Pembinaan Pelaku Usaha   | 110 Unit       | 7,253,000           |                 |
| 3-30.03         | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  | Kab. Sidrap | persentase sarana dan prasarana Distribusi perdagangan yang memadai  | 6,2 Persen     | 3,742,050,000  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  | Kab. Sidrap | persentase sarana dan prasarana Distribusi perdagangan yang memadai  | 6,2 Persen     | 3,150,000,000       |                 |
| 3-30.03.2.01    | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Kab. Sidrap | Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   | 6,2 Persen     | 3,742,050,000  | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Kab. Sidrap | Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   | 6,2 Persen     | 3,150,000,000       |                 |
| 3-30.03.2.01.01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Kab. Sidrap | Pasar Rakyat yang Dibangun dan Direvitalisasi  | 1 unit         | 3,030,000,000  | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Kab. Sidrap | Pasar Rakyat yang Dibangun dan Direvitalisasi  | 1 unit         | 3,150,000,000       |                 |
|                 |  |             | Pembangunan/ Rehabilitasi Gudang SRG   | 1 unit         | 712,050,000    |  |             |  |                |                     |                 |
|                 |  |             | Cakupan Bantuan Sarana Usaha Perdagangan (PKL dan Asongan)   | 100 Kelompok   |                |  |             |  |                |                     |                 |

| No.             | Rancangan Awal RKPD   |             |  |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan   |             |  |                |                     | Catatan Penting |
|-----------------|---|-------------|--|----------------|----------------|--|-------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
|                 | Program/ Kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 3.30.04         | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING   | Kab. Sidrap | Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya                            | 100 Persen     | 60,600,000     | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                  | Kab. Sidrap | Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya                            | 100 Persen     | 17,747,000          |                 |
| 3.30.04.2.01    | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                     | Kab. Sidrap | Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar  | 1 Kegiatan     | 14,645,000     | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota    | Kab. Sidrap | Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar  | 1 Kegiatan     | 10,494,000          |                 |
| 3.30.04.2.01.03 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                  | Kab. Sidrap | Jumlah Operasi Pasar pada Waktu Tertentu   | 1 kegiatan     | 14,645,000     | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Kab. Sidrap | Jumlah Operasi Pasar pada Waktu Tertentu   | 1 kegiatan     | 10,494,000          |                 |
| 3.30.04.2.02    | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                | Kab. Sidrap | Cakupan Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal  | 60 Laporan     | 36,865,000     |  |             |  |                |                     |                 |
| 3.30.04.2.02.01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Kab. Sidrap | Jumlah pemantauan harga dan stok bahan pokok dipasaran   | 48 laporan     | 36,865,000     |  |             |  |                |                     |                 |
|                 |   | Kab. Sidrap | Jumlah pengawasan secara berkala penyaluran Gas LPG bersubsidi di tingkat Agen dan Pangkalan             | 12 Laporan     |                |  |             |  |                |                     |                 |
| 3.30.04.2.03    | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Kab. Sidrap | Cakupan Intensitas Pengawasan Penyaluran Pupuk/ Pestisida Bersubsidi                                     | 12 Laporan     | 9,090,000      | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                           | Kab. Sidrap | Cakupan Intensitas Pengawasan Penyaluran Pupuk/ Pestisida Bersubsidi                                     | 12 Laporan     | 7,253,000           |                 |
| 3.30.04.2.03.03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi   | Kab. Sidrap | Jumlah Pengawasan Secara Berkala Penyaluran Pupuk / Pestisida Bersubsidi di Tingkat Distributor dan Kios | 12 laporan     | 9,090,000      | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                  | Kab. Sidrap | Jumlah Pengawasan Secara Berkala Penyaluran Pupuk / Pestisida Bersubsidi di Tingkat Distributor dan Kios | 12 laporan     | 7,253,000           |                 |
| 3.30.06         | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN   | Kab. Sidrap | Persentase Alat UTP yang Sesuai Standar Ukuran   | 100 Persen     | 265,529,000    | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  | Kab. Sidrap | Persentase Alat UTP yang Sesuai Standar Ukuran   | 100 Persen     | 201,874,000         |                 |



| No.             | Rancangan Awal RKPD   |             |  |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan   |   |  |                |                     | Catatan Penting |
|-----------------|---|-------------|--|----------------|----------------|--|---|--|----------------|---------------------|-----------------|
|                 | Program/ Kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan   | Lokasi  | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 3.30.06.2.01    | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan          | Kab. Sidrap | Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan | 100 persen     | 265,529,000    | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Kab. Sidrap   | Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan | 100 persen     | 201,874,000         |                 |
| 3.30.06.2.01.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                          | Kab. Sidrap | Jumlah Pelayanan Tera/ Tera Ulang  | 4000 alat UTTP | 145,844,000    | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                 | Kab. Sidrap   | Jumlah Pelayanan Tera/ Tera Ulang  | 4000 alat UTTP | 104,874,000         |                 |
| 3.30.06.2.01.02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal   | Kab. Sidrap | Jumlah Alat UTTP diawasi yang sesuai dengan standar ukuran                                 | 4 laporan      | 119,685,000    | Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal                               | Kab. Sidrap   | Jumlah Alat UTTP diawasi yang sesuai dengan standar ukuran                                 | 4 laporan      | 97,000,000          |                 |
|                 |   | Kab. Sidrap | Jumlah Peningkatan Pengetahuan pelaku usaha/ pemilik UTTP tentang peraturan kemetrolagian  | 100 orang      |                | Kab. Sidrap  | Jumlah Peningkatan Pengetahuan pelaku usaha/ pemilik UTTP tentang peraturan kemetrolagian | 100 orang  |                |                     |                 |
|                 |   | Kab. Sidrap | Jumlah SDM yang kompeten dalam Kegiatan Metrologi Legal                                    | 4 orang        |                | Kab. Sidrap  | Jumlah SDM yang kompeten dalam Kegiatan Metrologi Legal                                   | 4 orang  |                |                     |                 |
| 3.30.07         | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                          | Kab. Sidrap | Persentase Pelaku Usaha yang Terfasilitasi dalam Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri  | 50 Persen      | 137,370,000    |  |   |  |                |                     |                 |
| 3.30.07.2.01    | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Kab. Sidrap | Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri                 | 50 Persen      | 137,370,000    |  |   |  |                |                     |                 |
| 3.30.07.2.01.03 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan                         | Kab. Sidrap | Jumlah sistem informasi usaha Perdagangan  | 1 Kegiatan     | 137,370,000    |  |   |  |                |                     |                 |
|                 |   | Kab. Sidrap | Jumlah data base pelaku usaha perdagangan  | 1 Kegiatan     |                |  |   |  |                |                     |                 |
|                 |   | Kab. Sidrap | Jumlah sarana informasi harga bahan pokok secara digital di pasar type A                   | 1 Unit         |                |  |   |  |                |                     |                 |

| No.             | Rancangan Awal RKPD   |             |  |                 |                | Hasil Analisis Kebutuhan  |             |   |  |                     | Catatan Penting |  |
|-----------------|---|-------------|--|-----------------|----------------|---|-------------|---|--|---------------------|-----------------|--|
|                 | Program/ Kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian  | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan  | Lokasi      | Indikator Kinerja   | Target Capaian   | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |  |
| 3-31            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  |             |  |                 | 1,714,706,860  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  |             |   |  | 19,428,827,000      |                 |  |
| 3-31.02         | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI  | Kab. Sidrap | Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan  | 20.52 Persen    | 1,692,486,860  | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI  | Kab. Sidrap | Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan | 20.52 Persen   | 19,403,827,000      |                 |  |
| 3-31.02.2.01    | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                 | Kab. Sidrap | Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri   | 20.52 Persen    | 1,692,486,860  | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                 | Kab. Sidrap | Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri                  | 20.52 Persen   | 19,403,827,000      |                 |  |
| 3-31.02.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri          | Kab. Sidrap | Jumlah Pemberian Fasilitas Akses Perbankan bagi IKM  | 25 IKM          | 153,520,000    | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri          | Kab. Sidrap | Jumlah Pemberian Fasilitas Akses Perbankan bagi IKM             | 25 IKM   | 110,000,000         |                 |  |
|                 |   | Kab. Sidrap | Jumlah Pengembangan Jaringan IKM dalam Bentuk Pembinaan, Promosi, Pameran, Rakerda, Rakerwil, Dekranasda Award | 3 kali pameran  |                |   |             | Kab. Sidrap   | Jumlah Pengembangan Jaringan IKM dalam Bentuk Pembinaan, Promosi, Pameran, Rakerda, Rakerwil, Dekranasda Award |                     | 3 kali pameran  |  |
| 3-31.02.2.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kab. Sidrap | Jumlah Pengembangan Sentra IKM   | 1 Paket         | 1,334,462,500  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kab. Sidrap | Jumlah Pengembangan Sentra IKM                                  | 1 Paket  | 19,243,827,000      |                 |  |
|                 |   | Kab. Sidrap | Jumlah Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri   | 60 kelompok IKM |                |   |             | Kab. Sidrap   | Jumlah Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri   |                     | 60 kelompok IKM |  |
|                 |   | Kab. Sidrap | Jumlah dokumen pola pengembangan sentra industri   | 0 Dokumen       |                |   |             | Kab. Sidrap   | Jumlah dokumen pola pengembangan sentra industri   |                     | 0 Dokumen       |  |
|                 |   | Kab. Sidrap | Jumlah dokumen DED sentra industri   | 0 Dokumen       |                |   |             | Kab. Sidrap   | Jumlah dokumen DED sentra industri   |                     | 0 Dokumen       |  |
|                 |   | Kab. Sidrap | Jumlah Peralatan Sentra IKM  | 1 Paket         |                |   |             | Kab. Sidrap   | Jumlah Peralatan Sentra IKM  |                     | 1 Paket         |  |
|                 |   | Kab. Sidrap | Luas Lahan Pengembangan Sentra Industri  | 1 Ha            |                |   |             | Kab. Sidrap   | Luas Lahan Pengembangan Sentra Industri  |                     | 1 Ha            |  |



| No.             | Rancangan Awal RKPD   |             |   |                  |                       | Hasil Analisis Kebutuhan  |             |   |                  |                       | Catatan Penting |
|-----------------|---|-------------|---|------------------|-----------------------|---|-------------|---|------------------|-----------------------|-----------------|
|                 | Program/ Kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja   | Target Capaian   | Pagu Indikatif        | Program/Kegiatan  | Lokasi      | Indikator Kinerja   | Target Capaian   | Kebutuhan Dana (Rp)   |                 |
| 3.31.02.2.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  | Kab. Sidrap | Jumlah Kelompok Pengrajin Industri yang Dibina dan Dibimbing        | 3 kelompok       | 181,129,360           |   |             |   |                  |                       |                 |
|                 |   | Kab. Sidrap | Jumlah Pelatihan Teknologi Industri                                 | 30 orang         |                       |   |             |   |                  |                       |                 |
| 3.31.02.2.01.06 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri  | Kab. Sidrap | Jumlah kelompok IKM yang dibina                                     | 1 Kali Pembinaan | 23,375,000            | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri  | Kab. Sidrap | Jumlah kelompok IKM yang dibina                                     | 1 Kali Pembinaan | 50,000,000            |                 |
| 3.31.04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>   | Kab. Sidrap | <b>Pertumbuhan IKM</b>  | <b>1 Persen</b>  | <b>22,220,000</b>     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>   | Kab. Sidrap | <b>Pertumbuhan IKM</b>  | <b>1 Persen</b>  | <b>25,000,000</b>     |                 |
| 3.31.04.2.01    | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota  | Kab. Sidrap | Cakupan Penyediaan Sarana Informasi Industri                        | 1 Persen         | 22,220,000            | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota  | Kab. Sidrap | Cakupan Penyediaan Sarana Informasi Industri                        | 1 Persen         | 25,000,000            |                 |
| 3.31.04.2.01.01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Kab. Sidrap | Jumlah Sarana Informasi IKM yang Dapat Diakses Pemangku Kepentingan | 1 Laporan        | 22,220,000            | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Kab. Sidrap | Jumlah Sarana Informasi IKM yang Dapat Diakses Pemangku Kepentingan | 1 Laporan        | 25,000,000            |                 |
| <b>JUMLAH</b>   |   |             |   |                  | <b>10,540,911,981</b> |   |             |   |                  | <b>26,460,632,000</b> |                 |

**Tabel 2.4**  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Sidenreng Rappang

| No  | Pengusul              | Permasalahan   | Usulan   | Koefisien  | Anggaran                    | Alamat   |
|---|-----------------------|--|--|------------|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>   |                       |  |  |            |                             |  |
| <b>Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</b> |                       |  |  |            | <b><u>3,380.000,000</u></b> |  |
| <b>USULAN LANGSUNG (ASPIRASI)</b>   |                       |  |  |            | <b><u>680,000,000</u></b>   |  |
| 1   | A. TENRY WAHYU EFENDI | minimnya perlengkapan bagi kelompok usaha masyarakat khususnya(Mesin Jahit)  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 20,000,000                  | Kelurahan Arawa, Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Arawa  |
| 2   | SARTIKAH              | kurangnya modal kerja sehingga di butuhkan pengadaan alat masak untuk kelompok masak sebagai wadah pemberdayaan untuk menambah pemodalannya sehingga dapat memperluas usaha        | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 10,000,000                  | lingkungan 2 bunga wellu kelurahan batulappa kecamatan watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa  |
| 3   | SARTIKAH              | kurangnya modal kerja sehingga di butuhkan pengadaan alat cor untuk kelompok buruh bangunan sebagai wadah pemberdayaan untuk menambah pemodalannya sehingga dapat memperluas usaha | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 10,000,000                  | lingkungan 1 kampung baru kelurahan batulappa kecamatan watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa |
| 4   | A. MUH. RIDWAN, S.Sos | kelompok usaha masih membutuhkan alat untuk digunakan dalam menjalankan dan meningkatkan usaha tersebut, pengadaan alat menjahit 1 set   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 20,000,000                  | kelurahan batu, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Batu   |
| 5   | A. MUH. RIDWAN, S.Sos | kelompok usaha masih membutuhkan alat untuk digunakan dalam menjalankan dan meningkatkan usaha tersebut, pengadaan alat pertukangan kayu 1 set                                     | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 20,000,000                  | kelurahan batu, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Batu   |
| 6   | A. MUH. RIDWAN, S.Sos | kelompok usaha masih membutuhkan alat untuk digunakan dalam menjalankan dan meningkatkan usaha tersebut, pengadaan alat tata boga 1 set  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 10,000,000                  | kelurahan batu, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Batu   |
| 7   | SURIYATI RESSANG      | Pengadaan Alat Tata Boga   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 10,000,000                  | Kelurahan Duampanua, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua  |



|    |                       |  |   |            |            |   |
|----|-----------------------|--|---|------------|------------|---|
| 8  | SURIYATI RESSANG      | Pengadaan Alat Menjahit  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat                      | 1 Kelompok | 20,000,000 | Kelurahan Duampanua, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua                       |
| 9  | SURIYATI RESSANG      | Pengadaan Alat Pertukangan kayu                                | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat                      | 1 Kelompok | 20,000,000 | Kelurahan Duampanua, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua                       |
| 10 | SURIYATI RESSANG      | Pengadaan Alat Pertukangan Batu                                | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat                      | 1 Kelompok | 20,000,000 | Kelurahan Duampanua, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua                       |
| 11 | SURIYATI RESSANG      | Pengadaan Alat Perbengkelan / Las                              | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat                      | 1 Kelompok | 20,000,000 | Kelurahan Duampanua, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua                       |
| 12 | risma                 | Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan Las 2 Kelompok             | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat                      | 2 Kelompok | 40,000,000 | Dusun I Carawali Dan Dusun II Lamenge, Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Corawali |
| 13 | risma                 | Pengadaan Alat Perbengkelan Las 2 Kelompok                     | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat                      | 2 Kelompok | 40,000,000 | Dusun I Carawali Dan Dusun II Lamenge, Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Corawali |
| 14 | Ernawati daming,S,Sos | Pengadaan Alat Pengolahan Ikan dan Alat Kerajinan Eceng Gondok | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat                      | 1 Kelompok | 50,000,000 | Lingkungan Cilellang dan Orai Salo, Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Wetee       |
| 15 | Ernawati daming,S,Sos | Kerajinan Eceng gondok dan Pengolahan Ikan                     | Pelatihan Kewirausahaan berbasis Teknologi Industri untuk Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 50,000,000 | Lingkungan Cilellang dan Orai Salo, Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Wetee       |
| 16 | risma                 | Pengadaan Alat Pertukangan Batu 2 Kelompok                     | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat                      | 1 Kelompok | 20,000,000 | Dusun I Corawali Dan Dusun II Lamenge, Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Corawali |
| 17 | NURLINAH              | Pengadaan Alat Petukangan Batu 1 Kelompok                      | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat                      | 1 Kelompok | 20,000,000 | Lingkungan Benteng, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng Utama                    |
|    |                       |  |   |            |            |   |

|    |                |   |  |            |            |  |
|----|----------------|---|--|------------|------------|--|
| 19 | Yusran         | Permintaan peralatan tataboga, alat menjahit, dan alat las  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 20,000,000 | Desa Padangloang, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Padangloang   |
| 20 | DARMAWATI      | Perlunya Alat Pertukangan Batu Kelurahan Manisa dengan volume 2 Kelompok dan perkiraan biaya Rp. 50.000.000           | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 2 Kelompok | 50,000,000 | Kelurahan Manisa, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng   |
| 21 | DARMAWATI      | Perlunya Pengadaan Alat Perbengkelan Las Kelurahan Manisa dengan volume 1 Kelompok dan perkiraan biaya Rp. 25.000.000 | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 20,000,000 | Kelurahan Manisa, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng   |
| 22 | SUMIATI ACHMAD | Kurangnya Alat Bagi Masyarakat Pertukangan Kel. Baula   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 20,000,000 | Lk. I dan Lk. II Kel. Baula, Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula   |
| 23 | Andi Amin      | Kurangnya Pengadaan alat Pertukangan Kayu Di Desa   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 20,000,000 | Desa Kalempang, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Kalempang  |
| 24 | RAHMAN, S.I.P  | Kurangnya Perlengkapan Alat Tata Boga Kelompok Masyarakat   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 kelompok | 20,000,000 | Kelurahan Lalebata, Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Lelebata   |
| 25 | RAHMAN, S.I.P  | Kurangnya Alat Pertukangan Kelompok Usaha Masyarakat  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 20,000,000 | Kelurahan Lalebata, Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Lelebata   |
| 26 | TUSRI HADI     | ada beberapa kelompok pertukangan yang alatnya masih kurang, baik pertukangan kayu maupun tukang batu                 | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 20,000,000 | Dusun Baranti Wattang, Dusun Simpo, Dusun Padacenga Rijang, Dusun Kessi Pute, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Passeno |
| 27 | TUSRI HADI     | ada beberapa kelompok perbengkelan yang masih kekurangan alat untuk usahanya  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 kelompok | 20,000,000 | Dusun Baranti Wattang, Dusun Simpo, Dusun Padacenga Rijang, Dusun Kessi Pute, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Passeno |
| 28 | TUSRI HADI     | ada beberapa kelompok tata boga yang masih kekurangan alat untuk usahanya   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 10,000,000 | Dusun Baranti Wattang, Dusun Simpo, Dusun Padacenga Rijang, Dusun Kessi Pute, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Passeno |



|                                     |                                   |  |  |               |             |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|-------------|--|
| 29                                  | ANDI TENRIWARU, S. Sos            | Perlunya Pengadaan Mesin Jahit   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok    | 20,000,000  | Terkini Lingkungan Panreng Rijang, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Mamminasae |
| 30                                  | ANDI TENRIWARU, S. Sos            | Perlunya Pengadaan Mesin Jahit   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok    | 20,000,000  | Mawar Lingkungan Panreng Rijang, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Mamminasae   |
| 31                                  | Hj. ST. PARIDAH, SE               | minimnya perlengkapan berupa alat pertukangan bagi kelompok usaha masyarakat                           | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 kelompok    | 20,000,000  | Kelurahan Pajalele, Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele             |
| <b>USULAN RESES / POKOK PIKIRAN</b> |                                   |  | <b><u>2,700,000,000</u></b>                                    |               |             |  |
| 32                                  | ARYA YHOGA VIDIANARA              | kurangnya sarana dan prasarana bantuan kelompok usaha di keompok melati II Desa Talawe                 | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 4 Mesin Jahit | 20,000,000  | Talawe, Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Talawe                          |
| 33                                  | MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd | karena belum memadainya alat kelengkapan kelompok mesin jahit  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 5 Mesin Jahit | 25,000,000  | Arateng, Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng                         |
| 34                                  | JUMIATI                           | Karena kelompok usaha masyarakat ini membutuhkan mesin jahit untuk menunjang dalam usaha menjahitnya   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 2 kelompok    | 40,000,000  | Dusun Kaboe, Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo                                |
| 35                                  | JUMIATI                           | Karena kelompok usaha gula aren ini belum memiliki alat yang bagus untuk menunjang pembuatan gula aren | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Paket       | 100,000,000 | Maddenra, Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Maddenra                               |
| 36                                  | JUMIATI                           | Perlunya bantuan alat perbengkelan Ulu Salo Dusun Maddenra untuk menunjang kegiatan perbengkelan       | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok    | 20,000,000  | Dusun Maddenra, Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Maddenra                         |
| 37                                  | JUMIATI                           | Perlunya alat pertukangan di Dusun Maddenra untuk menunjang hasil kegiatan kelompok Usaha Masyarakat   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok    | 20,000,000  | Dusun Maddenra, Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo                             |
| 38                                  | NAHARUDDIN SADEKE                 | Bantuan alat tata boga   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 10 buah       | 20,000,000  | benteng, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng                              |
| 39                                  | NAHARUDDIN SADEKE                 | pengadaan bantuan alat tata boga   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 10 buah       | 20,000,000  | tersebar di kelurahan rijang panua, Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Rijang Panua |

|    |                                   |   |  |             |             |   |
|----|-----------------------------------|---|--|-------------|-------------|---|
| 40 | JUMIATI                           | Karena kelompok usaha tata boga masyarakat desa abbokongan, kulo dan Rijang panua belum memiliki alat pembuat kue.    | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 3 Kelompok  | 30,000,000  | Desa Abbokongan, Kulo Dan Rijang panua, Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Abbokongeng         |
| 41 | ARYA YHOGA<br>VIDIANTARA          | Karena masyarakat membutuhkan alat tata boga di kelompok usaha  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok  | 10,000,000  | Mojong, Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Mojong                                     |
| 42 | KASMAN, S.Hi                      | Kelompok usaha masyarakat membutuhkan beberapa alat mesin jahit untuk memperlancar jalannya usaha kegiatan masyarakat | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 21 unit     | 105,000,000 | Tanatoro, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Tanatoro                                    |
| 43 | SAENAL ROSI, A.Ma.<br>PUST        | BANTUAN ALAT TATA BOGA DI DAPIL 2   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 10 Kelompok | 100,000,000 | PANCA RIJANG, BARANTI, KULO, Kab. Sidenreng Rappang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa |
| 44 | ABD RAHMAN<br>MUSTAFA             | BANTUAN PERLENGKAPAN TATA BOGA  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 klp       | 10,000,000  | jl bambu runcing, Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang                           |
| 45 | ABD RAHMAN<br>MUSTAFA             | BANTUAN PERLENGKAPAN TATA BOGA  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 klp       | 10,000,000  | kel duampanua, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua                                 |
| 46 | MUHAMMAD SYUKUR<br>RABAISENG, S T | BANTUAN KELOMPOK TATA BOGA  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 2 kelompok  | 20,000,000  | DESA TONRONGNGE, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Tonrongnge                              |
| 47 | NAHARUDDIN<br>SADEKE              | pengadaan alat tata boga  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 10 buah     | 20,000,000  | tersebar di desa passeno, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Passeno                        |
| 48 | HABIBI SYAMSUDDIN,<br>SE          | pengadaan alat tata boga  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 2 Kelompok  | 50,000,000  | tersebar di kel rijang pittu, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu           |
| 49 | HABIBI SYAMSUDDIN,<br>SE          | pengadaan alat tukang kayu  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 2 Kelompok  | 50,000,000  | rijang pittu, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu                           |



|    |                              |   |  |            |             |   |
|----|------------------------------|---|--|------------|-------------|---|
| 50 | H. RUSMAN                    | PENGADAAN BANTUAN ALAT TUKAN BATU                             | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 2 Kelompok | 50,000,000  | ABBANUANGE, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Bila                                   |
| 51 | H. RUSMAN                    | PENGADAAN ALAT TATA BOGA                                      | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 2 Kelompok | 50,000,000  | DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Kalosi                                  |
| 52 | H. RUSMAN                    | PENGADAAN BANTUAN ALAT TUKANG LAS                             | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 2 Kelompok | 50,000,000  | BOLA BOLU, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Bola Bulu                              |
| 53 | SAINAL, S.Sos                | BANTUAN KLP MENJAHIT  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 5 KELOMPOK | 100,000,000 | KEC PITURIAWA, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Pitu Riawa, Seluruh Kelurahan/Desa |
| 54 | PALEPPANG MANSUR             | Bantuan kelompok menjahit Dusun Awakaluku Desa Kalosi Alau    | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 paket    | 20,000,000  | Dusun Awakaluku, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Kalosi Alau                       |
| 55 | AHMAD SALIHIN, S.Th., M. Hum | BANTUAN ALAT TATA BOGA UNTUK KELOMPOK IBU PKK DESA BILA RIASE | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 paket    | 10,000,000  | BILA RIASE, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Bila Riase                            |
| 56 | ANDI SUGIARNO BAHRI, SE      | PENGADAAN MENJAHIT KELOMPOK UMKM KEL. PANGKAJENE              | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 KELOMPOK | 20,000,000  | PANGKAJENE, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene                          |
| 57 | H. RUSMAN                    | BANTUAN TATA BOGA   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 10 buah    | 20,000,000  | BILA, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Bila   |
| 58 | H. RUSMAN                    | BANTUAN KELOMPOK MENJAHIT                                     | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 2 KELOMPOK | 50,000,000  | BILA, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Bila   |
| 59 | H. RUSMAN                    | PENGADAAN MESIN JAHIT   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 10 buah    | 20,000,000  | LAGALUMPANG, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Kalosi                                |
| 60 | ANDI ISMAN                   | pengadaan alata tata boga                                     | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 3 KELOMPOK | 60,000,000  | bulucenrana, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Bulucenrana                          |

|    |                            |   |  |             |               |  |
|----|----------------------------|---|--|-------------|---------------|--|
| 61 | SAENAL ROSI, A.Ma.<br>PUST | BANTUAN MESIN JAHIT UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT DI DAPIL 2                              | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 10 Kelompok | 100,000,000   | PANCARIJANG, BARANTI, KULO, Kab. Sidenreng Rappang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa           |
| 62 | ANDI ISMAN                 | pengadaan alat perbengkelan   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 3 KELOMPOK  | 60,000,000    | Bulucenrana, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Bulucenrana                                       |
| 63 | NAHARUDDIN SADEKE          | pengadaan bantuan mesin jahit   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 10 buah     | 50,000,000    | tersebar di kec baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Baranti, Seluruh Kelurahan/Desa          |
| 64 | NAHARUDDIN SADEKE          | pengadaan batuan alat tata boga   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 10 buah     | 20,000,000    | tersebar di kec.baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Baranti, Seluruh Kelurahan/Desa          |
| 65 | NAHARUDDIN SADEKE          | pengadaan alat tukang kayu  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 100 buah    | 1,000,000,000 | tersebar di seluru kec.baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Baranti, Seluruh Kelurahan/Desa   |
| 66 | ANDI ISMAN                 | pengadaan alat pertukangan kayu dan batu  | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 3 KELOMPOK  | 60,000,000    | pujo,bulucenrana, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Bulucenrana                                  |
| 67 | ANDI SUGIARNO BAHRI, SE    | PENGADAAN ALAT PERBENGKELAN KEL. PANGKAJENE   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 paket     | 20,000,000    | P;ANGKAJENE, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene                                      |
| 68 | ARIFIN DAMIS               | Kurangnya alat tataboga kelompok tersebut sehingga diperlukan pengadaan alat tataboga | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok  | 10,000,000    | Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Maritengngae, Seluruh Kelurahan/Desa |
| 69 | ARIFIN DAMIS               | Pengadaan Alat Perbengkelan   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok  | 20,000,000    | Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Maritengngae, Seluruh Kelurahan/Desa           |



|    |                             |   |  |            |            |  |
|----|-----------------------------|---|--|------------|------------|--|
| 70 | ARIFIN DAMIS                | Pengadaan mesin jahit                               | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 10 Unit    | 50,000,000 | lautang Benteng, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng |
| 71 | ARIFIN DAMIS                | Pengadaan alat perbengkelan                         | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 20,000,000 | Lautang benteng, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng |
| 72 | ARIFIN DAMIS                | Pengadaan mesin jahit                               | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 20,000,000 | Talawe, Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Talawe                  |
| 73 | ARIFIN DAMIS                | Pengadaan Mesin Jahit                               | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 20,000,000 | Kanie, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Kanie                     |
| 74 | ARIFIN DAMIS                | Pengadaan Alat Perbengkelan                         | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 Kelompok | 20,000,000 | Majelling, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling            |
| 75 | Dra. HJ. SITTI RAHMAH, M.Si | BANTUAN ALAT TATA BOGA KELOMPOK PEREMPUAN           | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 KELOMPOK | 20,000,000 | SIPODECENG, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Sipodeceng                |
| 76 | Dra. HJ. SITTI RAHMAH, M.Si | BANTUAN ALAT PERTUKANGAN KAYU                       | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 KELOMPOK | 20,000,000 | BENTENG, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng                      |
| 77 | Dra. HJ. SITTI RAHMAH, M.Si | BANTUAN ALAT TATA BOGA DI KELURAHAN PASSENO         | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 KELOMPOK | 10,000,000 | PASSENO, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Passeno                      |
| 78 | Dra. HJ. SITTI RAHMAH, M.Si | BANTUAN ALAT PERTUKANGAN BATU DI KELURAHAN MANISA   | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 KELOMPOK | 20,000,000 | MANISA, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Mamminasae                    |
| 79 | Dra. HJ. SITTI RAHMAH, M.Si | BANTUAN ALAT PERBENGKELAN DI KECAMATAN PANCA RIJANG | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 KELOMPOK | 20,000,000 | RAPPANG, Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang                 |
| 80 | Dra. HJ. SITTI RAHMAH, M.Si | BANTUAN ALAT PERTUKANGAN BATU DI KECAMATAN KULO     | Peningkatan Sarana Perlengkapan bagi Kelompok Usaha Masyarakat | 1 KELOMPOK | 20,000,000 | KULO, Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo                               |

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 3.1. Telahaan terhadap kebijakan Nasional.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian terbagi menjadi 3 bagian antara lain: Urusan Perindustrian, Pengembangan Perdagangan, dan Kemetrolagian yang merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional jangka menengah, bersama-sama dengan urusan bidang infrastruktur lainnya, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan yang mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian Negara Kepulauan Republik Indonesia.

Pembangunan Nasional Lima Tahun (Jangka Menengah) merupakan bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam pelaksanaannya dilakukan dua tahapan, yaitu APBN Awal dan APBN Perubahan. Dalam setiap penetapan APBN telah tertuang didalamnya berbagai Program lintas sektoral. Program Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah mengalokasikan sarana. Untuk Program Kementerian Perdagangan mengalokasikan dana Pembangunan Pasar Tradisional yang alokasi dananya dari DAK begitupun dengan urusan kemetrolagian yang pada tahu 2019 juga mendapatkan dana DAK.

##### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

| TUJUAN  | INDIKATOR TUJUAN                                | SASARAN                                 | INDIKATOR SASARAN   |
|---|---|---|---|
| Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan | Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB | Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan | Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai |



# RENJA 2023

## DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

|   |                         |  |  |
|---|-------------------------|--|--|
|   |                         |  | Persentase Alat UTP<br>Bertanda Tera Sah yang<br>Berlaku                 |
|   |                         |  | Persentase Pembinaan Usaha<br>Perdagangan/ Usaha<br>Informal             |
|   |                         | Meningkatnya Kualitas<br>Tata Kelola Keuangan<br>dan Kinerja | Predikat Nilai SAKIP   |
| Meningkatkan<br>Pertumbuhan Ekonomi<br>Sub Sektor Perindustrian | Pertumbuhan<br>Industri | Meningkatkan Kinerja<br>Sektor Perindustrian                 | Persentase Kelompok dan<br>Pelaku Industri yang<br>Mendapatkan Pembinaan |

### 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
    - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
    - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
    - d. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
    - e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
    - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
    - b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
  - 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
    - a. Pengamanan barang milik daerah SKPD
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
    - b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

# RENJA 2023

## DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan
  - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - c. Pemeliharaan mebel
  - d. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- 2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
  - 1) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
    - a. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
  - 1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
    - a. Penyediaan sarana distribusi perdagangan
- 4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - 1) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/ kota
    - a. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen pasar rakyat



# RENJA 2023

## DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

- 2) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota
  - a. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota
- 3) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  - a. Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
  - 1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
    - a. Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang
    - b. Pengawasan/ penyuluhan metrologi legal
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
  - 1) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
    - a. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota
    - b. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
  - 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota
    - a. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
    - b. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri
    - c. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat
    - d. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
  - 1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
    - a. Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data Kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui system informasi industri nasional (SIINAS)

# **RENJA 2023**

## **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sesuai tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**

| No.   | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | RENCANA TAHUN 2023   |                        |                               |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 |                               |
|-------|---|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|       |   |  | LOKASI               | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA                          |                 | TARGET CAPAIAN KINERJA            | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1     | 2   | 3  | 4                    | 5                      | 5                             | 7                                    | 8               | 9                                 | 10                            |
| 1.    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                      |                        | 3,654,931,000.00              |                                      |                 |                                   | 4,546,421,121                 |
| 1.1.  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah   | Pangkajene Sidenreng | 100 persen             | 14,875,000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 100 persen                        | 15,150,000                    |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Pangkajene Sidenreng | 3 dokumen              | 4,913,000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 3 dokumen                         | 4,040,000                     |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Pangkajene Sidenreng | 1 dokumen              | 3,018,000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 1 dokumen                         | 2,525,000                     |
| 1.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Pangkajene Sidenreng | 2 dokumen              | 1,755,000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 2 dokumen                         | 2,525,000                     |
| 1.1.4 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | Pangkajene Sidenreng | 1 dokumen              | 1,710,000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 1 dokumen                         | 2,020,000                     |
| 1.1.5 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | Pangkajene Sidenreng | 2 dokumen              | 1,769,000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 2 dokumen                         | 2,020,000                     |
| 1.1.6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pangkajene Sidenreng | 4 laporan              | 1,710,000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 4 laporan                         | 2,020,000                     |



| No.   | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                               | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | RENCANA TAHUN 2023          |                        |                               |   | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 |                               |
|-------|--|--|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|       |  |  | LOKASI                      | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA                                 |                 | TARGET CAPAIAN KINERJA            | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
|       |  |  |                             |                        |                               |   |                 |                                   |                               |
| 1.2   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    | <b>Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Pangkajene Sidenreng</b> | <b>100 persen</b>      | <b>3,075,772,000</b>          | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 | <b>100 persen</b>                 | <b>4,027,848,741</b>          |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Pangkajene Sidenreng        | 35 Orang/12 Bulan      | 3,074,022,000                 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 | 35 Orang/12 Bulan                 | 4,025,828,741                 |
| 1.2.5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Pangkajene Sidenreng        | 1 Lap                  | 1,750,000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 | 1 Lap                             | 2,020,000                     |
| 1.6   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Pangkajene Sidenreng</b> | <b>100</b>             | <b>175,856,100</b>            | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 | <b>100</b>                        | <b>111,403,000</b>            |
| 1.6.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                                 | Pangkajene Sidenreng        | 20 Paket               | 1,045,600                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 | 20 Paket                          | 1,515,000                     |
| 1.6.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                                       | Pangkajene Sidenreng        | 30 Dokumen             | 1,500,000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 | 30 Dokumen                        | 1,818,000                     |
| 1.6.9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Pangkajene Sidenreng        | 110 kali               | 173,310,500                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 | 110 kali                          | 108,070,000                   |
| 1.8   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Pangkajene Sidenreng</b> | <b>100 persen</b>      | <b>337,244,900</b>            | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 | <b>100 persen</b>                 | <b>314,827,100</b>            |
| 1.8.1 | Penyediaan Jasa Surat Meyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Pangkajene Sidenreng        | 68 Laporan             | 1,505,000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 | 68 Laporan                        | 1,262,500                     |
| 1.8.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan   | Pangkajene Sidenreng        | 12 Laporan             | 56,760,000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 | 12 Laporan                        | 57,327,600                    |

| No.     | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | RENCANA TAHUN 2023          |                        |                               |   | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 |                               |
|---------|--|---|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|         |  |   | LOKASI                      | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA                                 |                 | TARGET CAPAIAN KINERJA            | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
|         |  |   |                             |                        |                               |   |                 |                                   |                               |
| 1.8.4   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | Pangkajene Sidenreng        | 12 Laporan             | 278,979,900                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 | 12 Laporan                        | 256,237,000                   |
| 1.9     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Pangkajene Sidenreng</b> | <b>100 persen</b>      | <b>51,183,000</b>             | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 | <b>100 persen</b>                 | <b>77,192,280</b>             |
| 1.9.1   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  | Pangkajene Sidenreng        | 1 unit                 | 36,400,000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 | 1 unit                            | 31,209,000                    |
| 1.9.2   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | Pangkajene Sidenreng        | 17 unit                | 12,028,000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 | 17 unit                           | 17,703,280                    |
| 1.9.9   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi   | Pangkajene Sidenreng        | 1 unit                 | 2,755,000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 | 1 unit                            | 28,280,000                    |
| 3.30    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>  |   |                             |                        | <b>3,376,874,000</b>          |   |                 |                                   | <b>4,049,494,000</b>          |
| 3.30.02 | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>  | <b>Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam kepemilikan izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)</b> | <b>Kab. Sidrap</b>          | <b>100 Persen</b>      | <b>7,253,000</b>              | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 | <b>100 Persen</b>                 | <b>18,180,000</b>             |

| No.             | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | RENCANA TAHUN 2023 |                        |                               |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 |                               |
|-----------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                 |  |   | LOKASI             | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA                          |                 | TARGET CAPAIAN KINERJA            | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
|                 |  |   |                    |                        |                               |                                      |                 |                                   |                               |
| 3.30.02.2.01    | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan   | Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan   | Kab. Sidrap        | 100 Persen             | 7,253,000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 100 Persen                        | 18,180,000                    |
| 3.30.02.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kab. Sidrap        | 1 Dokumen              | 7,253,000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 1 Dokumen                         | 18,180,000                    |
| 3.30.03         | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  | persentase sarana dan prasarana Distribusi perdagangan yang memadai   | Kab. Sidrap        | 6,2 Persen             | 3,150,000,000                 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 6,2 Persen                        | 3,742,050,000                 |
| 3.30.03.2.01    | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distrbusi Perdagangan   | Kab. Sidrap        | 6,2 Persen             | 3,150,000,000                 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 6,2 Persen                        | 3,742,050,000                 |
| 3.30.03.2.01.01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan  | Kab. Sidrap        | 1 unit                 | 3,150,000,000                 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 1 unit                            | 3,742,050,000                 |
| 3.30.04         | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING  | Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya   | Kab. Sidrap        | 100 Persen             | 17,747,000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 100 Persen                        | 23,735,000                    |
| 3.30.04.2.01    | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  | Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar   | Kab. Sidrap        | 1 Kegiatan             | 10,494,000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 1 Kegiatan                        | 14,645,000                    |



| No.             | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | RENCANA TAHUN 2023 |                        |                               |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 |                               |
|-----------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                 |  |   | LOKASI             | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA                          |                 | TARGET CAPAIAN KINERJA            | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
|                 |  |   |                    |                        |                               |                                      |                 |                                   |                               |
| 3.30.04.2.01.03 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Kab. Sidrap        | 1 Laporan              | 10,494,000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 1 Laporan                         | 14,645,000                    |
| 3.30.04.2.03    | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                           | Cakupan Intensitas Pengawasan Penyaluran Pupuk/ Pestisida Bersubsidi  | Kab. Sidrap        | 100 Persen             | 7,253,000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 100 Persen                        | 9,090,000                     |
| 3.30.04.2.03.03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                  | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi minimal 90 %              | Kab. Sidrap        | 12 laporan             | 7,253,000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 12 laporan                        | 9,090,000                     |
| 3.30.06         | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>   | <b>Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar Ukuran</b>  | Kab. Sidrap        | 100 persen             | 201,874,000                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 100 persen                        | 265,529,000                   |
| 3.30.06.2.01    | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                 | Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan                                    | Kab. Sidrap        | 100 persen             | 201,874,000                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 100 persen                        | 265,529,000                   |
| 3.30.06.2.01.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang   | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang   | Kab. Sidrap        | 4000 alat UTTP         | 104,874,000                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 4000 alat UTTP                    | 145,844,000                   |
| 3.30.06.2.01.02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal  | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina   | Kab. Sidrap        | 50 Orang               | 97,000,000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 50 Orang                          | 119,685,000                   |

| No.             | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | RENCANA TAHUN 2023 |                        |                               |  | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 |                               |
|-----------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                 |  |  | LOKASI             | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA                                    |                 | TARGET CAPAIAN KINERJA            | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
|                 |  |  |                    |                        |                               |  |                 |                                   |                               |
| 3-31            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN   |  |                    |                        | 19,428,827,000                |  |                 |                                   | 1,533,577,500                 |
| 3-31.02         | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI   | Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan  | Kab. Sidrap        | 20,52 Persen           | 19,403,827,000                | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                 | 20,52 Persen                      | 1,511,357,500                 |
| 3-31.02.2.01    | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                    | Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri   | Kab. Sidrap        | 20,52 Persen           | 19,403,827,000                | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                 | 20,52 Persen                      | 1,511,357,500                 |
| 3-31.02.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri          | Kab. Sidrap        | 1 Dokumen              | 110,000,000                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                 | 1 Dokumen                         | 153,520,000                   |
| 3-31.02.2.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kab. Sidrap        | 1 Dokumen              | 19,243,827,000                | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik |                 | 1 Dokumen                         | 1,334,462,500                 |
| 3-31.02.2.01.06 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                             | Jumlah Dokumen Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                | Kab. Sidrap        | 1 Kali Pembinaan       | 50,000,000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                 | 1 Kali Pembinaan                  | 23,375,000                    |
| 3-31.04         | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                 | Pertumbuhan IKM  | Kab. Sidrap        | 1 Persen               | 25,000,000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                 | 1 Persen                          | 22,220,000                    |
| 3-31.04.2.01    | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan Penyediaan Sarana Informasi Industri   | Kab. Sidrap        | 1 Persen               | 25,000,000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                 | 1 Persen                          | 22,220,000                    |

| No.             | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | RENCANA TAHUN 2023 |                        |                               |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 |                               |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                 |   |  | LOKASI             | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA                          |                 | TARGET CAPAIAN KINERJA            | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
|                 |   |  |                    |                        |                               |                                      |                 |                                   |                               |
| 3.31.04.2.01.01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Kab. Sidrap        | 1 Laporan              | 25,000,000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1 Laporan       | 22,220,000                        |                               |
| <b>JUMLAH</b>   |   |  |                    |                        | <b>26,460,632,000</b>         |                                      |                 | <b>10,129,492,621</b>             |                               |



# RENJA 2023

## DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

### BAB IV

### PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan pencapaian Visi, Misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Renja SKPD ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja SKPD 2023 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program-program dapat memberikan hasil (*outcome*) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng, 05 Agustus 2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

AHMAD, SP., M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip 19710604 199803 1 019